

BAB IV

KARAKTERISTIK SOSIALISME INDONESIA MASA ORDE BARU

A. Sosialisme Religius

Pada saat liberalisme sekuler menampilkan seperangkat ide yang menentang masyarakat tradisional pada masa masa da hulu. Ide dominan yang melambangkan perubahan sejak tahun 1945 adalah sosialisme. Sosialisme tidak memberi sifat atau mengubah suatu kerangka masyarakat agamis, melainkan menampilkan kerangka itu sendiri yang merupakan ide ide dan pandangan pandangan dasar. Agama hanya memberi dukungan dan legitimasi, tetapi sosialisme menetapkan tujuan tujuan dan menetapkan sarana sarana masyarakat.

Karena kesadaran beragama pada masyarakat negara berkembang relatif tinggi, maka agama diyakini dapat memberikan pertautan makna yang penting antara pemerintah sosialis dan masyarakat awam. Sehingga peranan agama sebagai pembantu dan peranan dalam bidang duniawi tidak diragukan¹. Dan sosialisme dalam hal ini tidak harus diartikan sebagai hasil dari hukum dialektika materialisme. Tetapi sebagai humanisme dan hati nurani, sebagai pergaulan hidup.

Nilai ketuhanan atau religi merupakan dasar yang kuat untuk mewujudkan cita cita kemasyarakatan. Karena dasar moral yang kuat itu, maka sosialisme diharapkan tidak mudah terjerumus ke dalam lembah metode yang menghalalkan segala

¹Donald Eugene Smith, Agama Dan Modernisasi Politik, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hal. 283

74

cara sebagaimana sosialisme radikal.² Hanya kepercayaan kepada Tuhan sajalah yang akan memberi kedalaman rasa tanggung jawab dan moralitas kepada tindak tanduk manusia di dunia. Dengan adanya kepercayaan itu seorang manusia akan bertindak tidak semata mata karena perhitungan hasil dan akibat di dunia saja, tetapi lebih penting lagi adalah di alam kehidupan yang lebih kekal kelak.

Dasar tanggung jawab yang mendalam itu akan merupakan jaminan yang jauh lebih baik bagi kesejahteraan. Pelaksanaan suatu cita cita kemanusiaan seperti sosialisme atau masyarakat berkeadilan sosial. Ideologi ideologi tentang perubahan telah dikembangkan sehingga menjalin ikatan di antara tiap tiap agama, dengan beberapa konsep sosialisme.

Meskipun banyak kesulitan untuk memahami secara tepat apa yang dimaksud dengan sosialisme religius. Sebab pengkaitan yang tidak benar dari dua konsep itu akan menambal kesimpangsiuran dalam pemikiran orang. Jika sosialisme itu persis serupa dengan yang diperintahkan Islam untuk diterima maka sosialisme sendiri dapat kita terima sebagai ideologi.³

Sosialisme Islam didasarkan atas lima macam hak asasi yang harus dijamin bagi semua warga negara, yaitu;

1. Hak untuk hidup dan konsekwensinya, hak pemeliharaan dan perlindungan terhadap kesehatan dan penyakit.
2. Hak untuk memperoleh kebebasan dalam segala bentuknya dan terutama kebebasan berpolitik.

²Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan Dan Keindonesian, Mizan, Bandung, 1993, cet. V, hal. 108

³AK. Brohi, Konsepsi Sosialisme Islam, dalam, John, J. Donohue (ed.), Islam Dan Pembaharuan, Rajawali, 1989, hal, 241

- 75
3. Hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan: Hak ini meliputi segala macam ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh bangsanya, baik spiritual maupun material.
 4. Hak untuk memperoleh harga diri dalam segala aspeknya.
 5. Hak untuk mendapat hak milik, sesuai dengan persyaratan tertentu.⁴

Demikian gambaran menurut As Siba'i, yang mengupasnya dengan memakai komparasi sosialisme kiri yang ekstrim.

Pada hakekatnya sosialisme Islam sejalan dan sesuai dengan kodrat manusia. Sosialisme dan Islam menjamin dan melindungi harga diri semua warga negara serta kebutuhan hidup mereka. Kepada kaum buruh Sosialisme Islam menjamin kehidupan yang layak dan masa depan yang cerah. Kepada para pemilik modal ia membuka kesempatan yang luas di bidang produksi dengan bimbingan dan pengawasan negara. Dan terakhir sosialisme Islam memperlakukan warga negara tanpa membedakan dan tidak dibenarkan adanya pengikut pengikut-agama tertentu yang berbuat sewenang-wenang terhadap penganut agama lain.

Pada pidatonya Presiden Soeharto menjelaskan ciri-ciri pokok dari sosialisme religius yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu :

Tidak membenarkan adanya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan, pemerasan, kapitalisme, feodalisme, kediktatoran, kolonialisme dan imperialisme; karenanya harus bersama-sama menghapusnya. Di lain pihak..... selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.....⁵

Dan Nurcholis memberikan ancer-ancer, dari prinsip-prinsip dalam agama Islam yang secara langsung ada kaitan-

⁴Mustara As Siba'i, Sosialisme Islam, Rajawali Press Jakarta, 1989, hal. 209

⁵Presiden Soeharto, Amanat Kenegaraan II, Idayu Pres Jakarta, 1985, hal. 150

nya dengan jiwa dan semangat sosialisme.

76

1. Seluruh alam raya ini beserta isinya adalah milik Tuhan. Tuhanlah pemilik mutlak segala yang ada.
2. Benda benda ekonomi adalah milik Tuhan (dengan sendirinya), yang kemudian dititipkan kepada manusia (kekaayaan sebagai amanat).
3. Penerima . amanat harus memperlakukan benda Benda itu sesuai dengan "kemauan" Sang Pemberi Amanat (Tuhan), yaitu hendaknya "diinfakkan" menurut "jalan Allah".
4. Kesempatan manusia memperoleh kehormatan amanat Allah itu (yaitu, mengumpulkan kekayaan) haruslah didapatkan dengan cara yang bersih dan jujur (halal).
5. Harta yang halal itu setiap tahun harus dibersihkan dengan zakat.
6. Penerima amanat harta tidak berhak menggunakan (untuk diri sendiri) harta itu semaunya, melainkan harus dengan timbang rasa begitu rupa sehingga tidak menyinggung rasa keadilan umum (tidak kikir dan juga tidak boros, melainkan berada diantara keduanya).
7. Orang miskin mempunyai hak yang pasti dalam harta orang kaya.
8. Dalam keadaan tertentu, kaum miskin berhak "merebut" hak mereka itu dari orang orang kaya, jika pihak kedua ingkar.
9. Kejahatan tertinggi terhadap kemanusiaan ialah penumpukan kekayaan pribadi tanpa memberinya fungsi sosial.
10. Cara memperoleh kekayaan yang paling jahat ialah riba atau exploitation de l'homme par l'homme.
11. Manusia tidak akan memperoleh kebajikan sebelum men sosialisasikan harta yang dicintainya.⁶

Meskipun prinsip prinsip tersebut tidak memperoleh pelaksanaan secara harfiah. Namun jelas prinsip prinsip itu terhumjam dalam sekali dalam agama Islam, termuat tegas dalam Alquran.

B. Orientasi sosialisme Indonesia Orde Baru

Sosialisme bukanlah semata mata soal ekonomi, sosialisme juga mempunyai bidang sosial dan kultur yang luas. Sosialisme meliputi seluruh hidup manusia, memberikan kepercayaan kepada manusia bahwa hidup di dunia yang fana ini

⁶Nurcholis Madjid, Op. Cit., hal. 110 - 111

diliputi kebahagiaan. Tetapi ekonomi adalah dasarnya sebab 77 masyarakat yang tidak mempunyai dasar ekonomi yang kuat tidak akan sanggup melaksanakan pendidikan yang baik dan perbaiki sosial serta tidak sanggup menikmati kebudayaan. Karena itu pembangunan sosialisme harus bermula pada pembangunan ekonomi dan orang sosialis yang benar benar sosialis barulah ada dalam masyarakat sosialis. Bekerja dalam sistem sosialis dalam hubungan yang harmonis dimana kepribadian manusia tidak tertindas, memupuk manusia menjadi sosialis.

Karenanya, bukan orang sosialis yang harus ada lebih dulu untuk menyelenggarakan sosialisme, melainkan sosialis melah yang menghidupkan orang sosialis. Sebab itu merintis jalan ke sosialisme dapat dikerjakan, asal ada cita citanya dan pendukung inti yang berkemauan untuk menjadi pelopor dan pembimbingnya. Tiap tiap pembangunan yang berdasarkan cita cita besar dimulai oleh suatu golongan kecil yang aktif dan orang banyak, mengikuti di belakang.

Oleh karena tujuan sosialisme yang terdekat ialah melepaskan rakyat dari kesengsaraan hidup dan memberikan jaminan hidup bagi tiap tiap orang. Maka soal ekonomi yang pertama bagi sosialisme ialah menentukan dan memperoleh barang barang keperluan hidup yang terpenting bagi rakyat. Dengan pandangan sekilas saja dapat diketahui bahwa keperluan hidup rakyat yang terutama adalah, makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan anak anak. Urutan itu kira kira sama bagi segala bangsa, tetapi intensitasnya yang berbeda. Bagi rakyat Indonesia yang banyak adalah masih hi

78
dup di bawah garis kemiskinan, maka urutan keperluan dan intensitasnya sejalan.

Segala usaha untuk menyandarkan diri pada gagasan sosialisme Mohammad Hatta bisa dipahami. Pertama, adalah karena sesuai dengan pendekatannya yang empiris, sistem sosialisme itu setidaknya tidaknya dapat dilacak dalam sejarah Indonesia, baik dari segi nilai yang terkandung dalam Islam maupun dari segi reaksi masyarakat Indonesia terhadap ketidakadilan di masa penjajah. Kedua, pada skala prioritasnya bukanlah terletak pada segi perdebatan intelektual yang berkepanjangan, melainkan bagaimana merealisasikan gagasan-gagasan itu dalam situasi yang lebih kongkrit⁷, demikian komentar Adi Sasono terhadap pandangan Mohammad Hatta.

Pandangan yang dikemukakan oleh Hatta merupakan bahan utama untuk interpretasi mengenai sosialisme Indonesia. Dari pandangan itulah muncul hakekat BAB XIV tentang kesejahteraan sosial yang memuat pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Diperkuat pula dengan adanya pandangan yang melahirkan hak-hak warga negara yang menyangkut kesamaan kedudukan dan kelayakan hidup sebagai manusia pada pasal 27, tidak lain dan tidak bukan adalah mempertegas adanya orientasi sosialis.

Apabila sosialisme pada masa Orde Lama dikatakan oleh Soekarno mempunyai ciri-ciri pokok; perpaduan antara unsur-unsur sosialisme yakni, keadilan sosial dan kesejahteraan dengan unsur-unsur kepribadian Indonesia yaitu, keke-

⁷ Adi Sasono, Islam Dan Sosialisme Religius, dalam, Amrullah Ahmad (ed.) Aspirasi Umat Islam Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1983, hal. 111-113

79
luargaan dan gotong royong⁸. Sedangkan dasar dari sosialis-
me Indonesia Orde Baru berorientasi kepada:

- Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai indikator adanya etik dan moral agama bukan materialisme.
- Kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal pemer-
asan dan exploitation de l'homme par l'homme.
- Persatuan, mengenal adanya asas kekeluargaan, kebersama-
an, nasionalisme dan patriotisme.
- Kerakyatan, lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan ha-
jat hidup orang banyak serta adanya demokrasi.
- Keadilan sosial, mengutamakan persamaan, kemakmuran ma-
syarakat dan juga orang perorang⁹.

Demikian analisis Sri Edi atas pikiran pikiran yang dikemu-
kakan oleh Hatta.

Hal ini senada dengan pidato Presiden Soeharto, bah-
wa bangsa Indonesia tidak akan kembali ke alam liberalisme
juga tidak akan kembali ke alam demokrasi terpimpin. Semua
harus ditinggalkan untuk selamanya. Kebangkitan Orde Baru
sendiri merupakan koreksi atas semua penyelewengan Orde La-
ma.¹⁰ Pidato tersebut memberikan satu penegasan bahwa pola
gerak pembangunan nasional atau sosialisme Indonesia harus
terlepas dari unsur unsur Orde Lama. Orde Baru hendak mem-
bentuk masyarakat baru, dengan wajah baru, dengan semangat
baru atas dasar keyakinan dan falsafah bangsa yaitu, Panca
sila.

⁸S. Surjo Untoro, Ensiklopedia Sosialisme, Ksatya, Su-
rabaya, 1963, hal. 91

⁹Sri Edi Swasono, Ekonomi Indonesia; Sosialisme Reli-
gius, dalam, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, UI Press

¹⁰Presiden Soeharto, Op. Cit., hal. 171

80

Belakangan ini kalangan pemikir Indonesia dilanda satu gejala baru yaitu, obsesi terhadap sistem ekonomi Indonesia atau sosialisme Indonesia. Dalam obsesi untuk mewujudkan sosialisme Indonesia, sebagian besar memakai pendekatan adaptif atau pendekatan ideologis menurut istilah Dawam Raharjo. Umpamanya, dengan munculnya istilah sosialisme religius untuk sosialisme Indonesia yang pada dasarnya adalah keadilan sosial.¹¹

Sungguhpun begitu terdapat pula kecenderungan untuk menghindari istilah sosialisme. Hal ini dilakukan dengan menyebut dan menjabarkan pengertian demokrasi. Istilah ini memang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 dan dikutip lagi pada GBHN tahun 1973 hingga GBHN 1988.

Apa yang disinyalir oleh Dawam di atas memang terdapat pada kalangan pemikir Indonesia. Agaknya pemikir-pemikir itu berpendapat bahwa ideologi apapun yang lahir dan diterima di Indonesia harus mengalami penyesuaian, harus diadaptasikan bukan diadopsi dengan nilai-nilai budaya, kepribadian masyarakat dan sejarah Indonesia.

Pemerintah Orde Baru memberi satu ketegasan tentang arah dan gerak pembangunan nasional harus tetap dijiwai oleh Pancasila. Yang artinya, pembangunan yang saat ini dilakukan diharapkan tidak hanya menghasilkan kemakmuran, tetapi juga harus menjamin adanya keadilan sosial baik material maupun spiritual. Dan masyarakat maju yang dibangun itu haruslah merupakan masyarakat Indonesia yang tetap berco-

¹¹Dawam Raharjo, Pragmatisme Dan Utopia, LP3ES, Jakarta, 1992, hal. 25

rak pada kepribadian sendiri.¹²

81

Mubyarto pada bulan September 1980, untuk pertama kali melontarkan gagasan tentang ekonomi Pancasila dalam suatu ceramah di fakultas FISIPOL Universitas Indonesia. Kemudian pada ceramahnya tanggal 16 Mei 1981 di Gedung Kebangkitan Nasional, ia mengemukakan lima ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila, yaitu :

1. Roda perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral;
2. Kehendak kuat seluruh masyarakat ke arah keadaan kemera-taan sosial sesuai dengan asas kemanusiaan;
3. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi;
4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling kongkrit dari usaha bersama;
5. Ada imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial.¹³

Gagasan Mubyarto tersebut mendapat tanggapan dari Arief Budiman yang memicu perdebatan yang lebih luas tentang konsep sistem ekonomi Pancasila tersebut. Tanggapan dari Arief, banyak mengundang tanggapan dan komentar karena berkesan skeptis, yaitu :

¹²Presiden Soeharto, Op. Cit., hal. 147

¹³Mubyarto, Moral Ekonomi Pancasila, Inti Idayu Pres Jakarta, 1982, hal. 13 - 16

Pada saat ini kita meragukan akan kemungkinan adanya suatu masyarakat yang sosialis. Bagaimana mungkin ada orang yang mau bekerja tanpa dibayar, semata mata hanya untuk menolong orang lain dan memajukan masyarakat. Bukankah hakikat manusia untuk mendahulukan kepentingan diri sendiri ?¹⁴

Mubyarto sendiri menganggap, tulisan Arier bukannya sebuah kritik, apalagi tanggapan yang membahas sistem ekonomi Pancasila, melainkan hanyalah sebuah skeptisisme. Sedangkan Budiono menolak bahwa sistem ekonomi Pancasila dan gagasan Mubyarto adalah sebuah utopia, sebuah gagasan yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak didasarkan pada konsep manusia yang jelas. Penanggap lain adalah SM.Noor, dari Universitas Hasanuddin juga menolak bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah utopia yang tidak etis dan tidak manusiawi, karena menurut pendapatnya, uraian Mubyarto baginya cukup jelas dan mendekati kenyataan. Demikian halnya Sudirman Kadir juga menolak penamaan utopia terhadap konsep Mubyarto, karena penggagasnya juga membicarakan hal hal yang disebut Arier tidak jelas, misalnya rangsangan moral dan tinjauan historis.¹⁵

Pendekatan adaptif pada umumnya dipengaruhi oleh ideologi sosialisme, sebagai lawan dari sistem kolonial dan sistem kapitalis. Pendekatan ini semakin surut pada masa Orde Baru yang puncaknya dalam periode 1959 hingga 1966. Sungguhpun begitu, para pemikir Indonesia pada umumnya tidak mencaplok begitu saja suatu rumusan ideologi apalagi

¹⁴ Ekonomi Pancasila Dalam Guntingan Pers, dalam Idayu, Moral Ekonomi Pancasila, Idayu, Jakarta, 1982, hal. 72

¹⁵ Ibid., hal. 75 - 86.

83

menerapkannya secara total. Langkah yang dilakukan adalah mengambil intisari ideologi sosialisme, khususnya nilai keadilan sosial sehingga menjadi konsep sosialisme Indonesia. Konsep itu pertama tama bertolak dari nilai nilai tradisional yang berlaku dalam masyarakat dan ajaran agama, yaitu nilai nilai kekeluargaan dan kegotong-royongan yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diperkuat dengan teori teori sosialisme ilmiah.

Sehubungan dengan upaya pencarian sistem sosialisme-Pancasila, pemerintah Orde Baru melalui pidato Presiden di depan Dewan antara lain menyatakan :

Dalam memikirkan ekonomi Pancasila itu kita hendaknya berpangkal dari bumi Indonesia sendiri, yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Memikirkan konsep politik konsep ekonomi dan konsep sosial dengan bertolak dari paham lain di luar Pancasila dan UUD 1945, pasti akan membawa kita ke arah kesesatan jalan.¹⁶

Menurut Dawam, pandangan pemerintah itu harus dipahami; pertama, bangsa Indonesia terikat dengan Pancasila sebagai nilai nilai dasar yang kita anut dan UUD 1945 sebagai pedoman normatif dalam bentuk struktur legal formal. Kedua, dalam mengembangkan konsep sistem ekonomi Pancasila kita harus bertolak dari faktor faktor Indonesia, baik dalam arti proses kesejarahan Indonesia, kondisi dan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia maupun nilai nilai-transendental yang pada umumnya dianut bangsa Indonesia.¹⁷

¹⁶ Presiden Soeharto, Amanat Kenegaraan III 1977-1981 Inti Idayu Pres, Jakarta, 1985, hal. 173

¹⁷ Dawam Raharjo, Op. Cit., hal. 83

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

89

Kalau kita mengikuti cara pandang Cokroaminoto bahwa cita cita sosialisme yang sejati selamanya tidak akan terwujud kalau manusia tidak bertuhan. Sosialisme haruslah seiring dan berdasar pada kepercayaan akan adanya Tuhan. Kalau perbuatan dan pikiran manusia tidak dipimpin atau diamati oleh kepercayaan agama, maka sosialisme akan teresat membawa kerusakan kepada manusia.¹⁸

Sosialisme hanya bisa menjadi sempurna apabila manusia tidak hidup hanya untuk dirinya, tidak hanya mengejar keperluan dan kesenangan yang ada di dunia. Akan tetapi setiap manusia hendaknya mengejar cita cita yang lebih tinggi, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan yaitu, untuk menciptakan negara; *بِلَادَةٍ كَاتِبَةٍ وَرَبِّ غَفُورٍ* "negara yang berkebakikan dan diliputi oleh keridhaan Ilahi".¹⁹

Di dalam dunia yang hanya dikuasai oleh akal dan materialisme saja, maka segala keterampilan dan kepandaian hanya akan digunakan untuk keperluan si kuat guna menindas si lemah. Dari itu hanya agama dan kekuatan rohani yang sanggup membawa manusia kepada cita cita yang mulia, tidak saja di dunia yang fana tetapi juga di akhirat kelak. Hanya agama yang mampu menggerakkan manusia untuk mengusahakan segala kekuatan rohani dan kekuatan budi untuk menyempurnakan hidup yang lebih mulia.

¹⁸HOS Cokroaminoto, Islam Dan Sosialisme, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, cet. V, hal. 71 - 72

¹⁹Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahnya, Yamu nu, Jakarta, 1971, hal. 846

85

Dari segi nilai yang terkandung dalam Ketuhanan Yang Maha Esa dapat disebutkan bahwa asas ini merupakan dasar kerohanian, dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, asas Ketuhanan Yang Maha Esa antara lain berarti bahwa didalam menyelenggarakan kehidupan bernegara wajib menghargai, memperhatikan dan menghormati petunjuk Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuanNya. Putusan, peraturan dan perundang undangan penguasa wajib memperhatikan dan menghormati aturan aturan Tuhan. Menurut Hatta, asas Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar memimpin cita cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi masyarakat dan pemerintahan negara pada hakekatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan-bangsa bangsa. Dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa politik negara mendapat dasar moral yang kuat.

Sebagai asas hidup masyarakat, Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut agar bangsa Indonesia dalam melaksanakan hidup bermasyarakat memperhatikan dan menghormati petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Mupuk kerjasama kemanusiaan menuju kerukunan, menghormati kebebasan beragama serta beribadat-menurut keyakinan agama masing masing dengan tidak memaksa kepada orang lain.

Semua agama jelas mengandung suruhan untuk membangun masyarakat agar tercapai kebahagiaan hidup. Dan apabila umat beragama menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat nan-

86
ti, maka jalan untuk itu adalah juga kebahagiaan hidup di dunia sekarang. Kebahagiaan hidup di dunia yang sekarang ini hanya mungkin tercapai melalui pembangunan. Pembangunan sendiri memerlukan kekuatan pendorong yang tidak boleh kendor. Kekuatan yang terbesar terletak pada niat masyarakat sendiri untuk merubah nasib dan ditambah dengan kesadaran bahwa nasib itu hanya dapat diperbaiki melalui pembangunan. Dalam memperkuat niat merubah nasib melalui pembangunan itu pula maka kesadaran keagamaan sangat besar pengaruhnya.²⁰

Khususnya mengenai tata hukum di Indonesia, bagi umat beragama terutama Islam dengan diberlakukannya hukum agama merupakan tuntutan hakikinya. Sejalan pula dengan kedudukan Piagam Jakarta yang menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Maka pada tempatnyalah jika dikatakan bahwa hukum agama bagi umat beragama memperoleh kekuatan untuk diberlakukan di Indonesia yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketuhana Yang Maha Esa mencerminkan sifat satu bangsa yang percaya akan adanya kehidupan lain dimasa nanti setelah kehidupan dunia sekarang. Hal mana ini akan memberidorongan yang kuat kepada manusia untuk mengejar nilai nilai yang luhur, yang akan membuka jalan bagi kehidupan di masa nanti yang lebih baik. Karena kemakmuran dan keadilan sosial yang ingin diwujudkan bangsa dan masyarakat Indone-

²⁰ Presiden Soeharto, Agama Dalam Pembangunan Nasional, Kuning Mas, Jakarta, 1984, cet. II. hal. 77

sia adalah berasaskan kekeluargaan dan religius.²¹

87

1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tauhid.

Jika diperhatikan lahirnya perumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu dalam pertemuan khusus sebelum rapat pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dimana terjadi diskusi kecil antara Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. T. Muhammad Hassan yang dihadiri juga oleh Hatta Ki Bagus menunjukkan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu bermakna tauhid, begitu penjelasan Azhar Basyir atas perumusan Pancasila.²²

Secara epistimologi, tauhid berarti mengesakan Allah dalam hati dan melalui perbuatan.²³ Dan formulasi paling pendek dari tauhid itu menurut Amien Rais adalah kalimat thayyibah: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "tidak ada Tuhan selain Allah". Tauhid berarti komitmen manusia kepada Tuhan sebagai fokus dari seluruh rasa hormat, rasa syukur, dan sebagai satu sumber nilai.²⁴ Dapat juga dikatakan bahwa tauhid merupakan fondasi seluruh bangunan ajaran Islam. Pandangan hidup tauhid bukan saja mengesakan Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh kaum monoteis. Tetapi juga meyakini kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntutan hidup dan kesatuan tujuan hidup yang semuanya merupakan derivasi

²¹ Ibid., hal. 144

²² KH. Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Mizan, Bandung, 1993, hal. 246

²³ Hussein Bahreisj, 450 Masalah Agama Islam, Al Ikhlas, Surabaya, 1980, hal. 206

²⁴ M Amien Rais, Cakrawala Islam, Mizan, Bandung, 1991 cet. III, hal. 13

dari kesatuan ketuhanan. 88

Tauhid mengajarkan bahwa seluruh fenomena lahiriyah-misalnya siang dan malam, darat dan laut, matahari, bumi, manusia dan seluruh makhluk adalah tanda tanda kekuasaan Tuhan. Keteraturan dari semua yang ada menunjukkan, tidak perlu ada kontradiksi antara manusia dan alam, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Juga menolak kontradiksi legal sosial, politik, rasial, ekonomi dan bahkan kontradiksi nasional antar bangsa.

Kontradiksi kontradiksi di atas bukan saja ditolelir tetapi bahkan sering dipertajam dan diperluas oleh pandangan hidup yang non tauhid. Pandangan hidup non tauhid didalam prakteknya menjurus pada pembenaran terhadap kehidupan eksploitatif, feodalistik yang menerima stratifikasi masyarakat berkelas. Ajaran tauhid justru memberi pesan untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang bebas dari unsur unsur eksploitatif, feodalistik dan menghindari pelapisan masyarakat.

Cita cita Keislaman yang fundamental itu sejalan dengan cita cita kemanusiaan pada umumnya, tentunya cita cita Keislaman di Indonesia juga sejalan dengan cita cita manusia Indonesia. Hal ini mengimplikasikan adanya kepercayaan tentang kebaikan alami manusia, dengan sendirinya termasuk manusia Indonesia. Apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu merupakan modal rohaniyah yang sangat penting-bagi kehidupan dan pertumbuhan bangsa yang sedang membangun negaranya.

89

Semangat dan kesadaran Berketuhanan Yang Maha Esa di dalam Islam secara teknis disebut taqwa adalah inti ajaran Islam. Dan jika kita mengikuti cara Hatta dalam memandang Pancasila dimana asas Ketuhanan Yang Maha Esa, dipandang sebagai asas utama yang menjiwai asas-asas lainnya. Dan menurut Nurcholis, kita juga bisa mengatakan bahwa asas Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan asas vertikal dan asas-asas selanjutnya adalah asas-asas horizontal. Bahkan dapat dikatakan dari sudut Islam, keempat asas lainnya merupakan beberapa konsekuensi logis kesadaran Berketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

2. Apresiasi Tauhid.

Satu hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa komitmen manusia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak terbatas pada hubungan vertikal dengan Tuhan melainkan juga mencakup hubungan horizontal dengan sesama manusia dan seluruh makhluk. Segala pola hubungan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Tuhan ini memberikan visi pada manusia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa (Tauhid) untuk membentuk suatu masyarakat yang mengejar nilai-nilai utama dan mengusahakan tegaknya keadilan sosial.

Tauhid menurut tinjauan Alquran adalah kekuatan pembabas bagi manusia dari segala belenggu dan ketergantungan. Sebab tempat bergantung hanyalah Allah SWT :

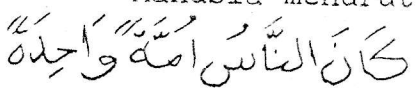
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الْقَاسِمُ ②
الخلاص ٢٠١

²⁵ Nurcholis Madjid, Cita Cita Politik Kita, dalam Amrullah Ahmad, Aspirasi Umat Islam Indonesia, LP3ES, Jakarta 1983, hal. 29 - 30

Katakan: Dialah Allah Yang Maha Esa.
Allah adalah tempat meminta (bergantung)²⁶

90

Peran yang seharusnya dimainkan oleh manusia tauhid adalah berani dan mampu membebaskan dirinya dari segala jenis belenggu. Manusia tauhid haruslah mampu menunjukkan alternatif alternatif baru dan segar dalam usaha menembus kebingungan umat disegala zaman. Pencarian alternatif ini adalah perbuatan ihsan bagi kepentingan sesama manusia. Dan ihsan yang memancar dari ruh tauhid adalah ihsan murni dan sejati. Menurut hemat penulis nilai eksistensi manusia tauhid ditentukan oleh intensitas amal kebajikannya terhadap umat manusia secara keseluruhan. Kebajikan ini terwujud dalam bentuk tegaknya keadilan, persamaan, persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat manusia.

Manusia menurut Alquran adalah sebuah keluarga besar  inilah pesan universal Alquran yang wajib direalisasikan oleh manusia tauhid. Bukan semata mata untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain yang tidak seiman dengannya. Seseorang hanya mungkin bersikap apresiatif secara intens terhadap ajaran tauhid dan implementasi nya di bidang sosial dan kemanusiaan bila ia telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Alquran sebagai kitab suci dari Allah.

Pesan egaliter yang mengibarkan panji panji persamaan dan keadilan bagi kepentingan manusia bersumber sepenuhnya dari prinsip tauhid. Dalam sejarah, pesan ini kadang

²⁶Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 1118

kadang terdengar nyaring karena segarnya situasi, tapi kadang kadang terdengar sangat lirih lantaran beratnya beban psikologis yang harus dipikul tatkala prinsip kemerdekaan dan kebebasan berada dalam ancaman otoriter atau totaliter tiran. Namun sebegitu jauh, pesan egaliter ini tidak pernah surut dan punah dari pergaulan umat Islam. Pesan egaliter ini tidak saja menuntut persamaan dan perlakuan adil di segala bidang.

Dari refleksi yang dibahas di muka, barangkali jelas bahwa suatu apresiasi terhadap tauhid hanyalah mungkin bila latar belakang sosio politik dan ekonomi diungkap secara historis dan sosiologis. Tanpa pengungkapan itu maka apresiasi kita terhadap tauhid dan implikasinya di bidang sosio politik boleh jadi akan kehilangan benang merah.

Sistem sistem sosialis yang tidak berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah sistem sosialis ciptaan manusia atas dasar filsafat tertentu. Sistem sistem itu mencoba untuk menyesuaikan diri dengan ajaran materialisme dan dalam kehidupan sehari hari nampak sekali pengaruhnya. Ajaran dari Marxis misalnya, ia didasari oleh filsafat yang dikenal dengan dialektika materialisme. Sosialisme itu yang dipraktikkan di negara Rusia, RRC dan negara negara Balkan, ternyata hanya menimbulkan kesengsaraan baru yang berujud diktator proletar dengan pemerkosaan atas nama negara.

Berbeda dengan hal tersebut bahwa sosialisme yang didasarkan atas kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, tidak lahir karena hal serupa melainkan lahir sebagai buah atau-

92
hasil dari sistem yang berdasar atas wahyu (petunjuk) dari Tuhan. Dari sumber inilah lahir masyarakat yang agamis dengan segala aspek dan ciri ciri yang khas, sehingga setiap orang akan menyesuaikan dan dapat mempraktekkan atas bentuk yang dikehendaki Tuhan. Dan pengembangannyapun selalu dalam aturan dan batasan yang sudah ada.

Sosialisme theis ini lahir bukan karena faktor historis ekonomi sebagaimana yang terjadi pada sosialisme pada umumnya. Sebagaimana yang disebut oleh kaum Marxisme yang menggambarkan seolah olah sistem mereka itulah sistem yang universal dan yang harus diterima sebagai satu kepastian yang tidak dapat ditolak.

b. Asas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, kiranya jelas merupakan dasar moral perilaku ekonomi maupun sosial manusia Indonesia. Meskipun secara empirik sulit dibuktikan, namun sering dikatakan bahwa kesediaan mengendalikan diri, sikap tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dari manusia Indonesia sebenarnya cukup besar. Semangat kekeluargaan, cinta mencintai dan tenggang rasa sudah merata pada seluruh anggota masyarakat yang menjelma menjadi semangat solidaritas sosial menuju pemerataan sosial. Ini merupakan manifestasi dari asas kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berdasarkan pengalaman, semangat solidaritas akan me-
nebal dalam keadaan kesusahan dan serba prihatin dan sebaliknya cenderung menipis dalam kemakmuran. Tetapi dalam hal ini banyak pengecualian, karena ada kecenderungan kuat

92
berkembangnya rasa sosial dan peningkatan kegiatan kemanusiaan pada saat seseorang mencapai sukses dalam bidang usaha. Sifat sifat kedermawanan ini memang selalu terlihat semakin berkembang bila orang menjadi semakin kaya, lebih lebih bagi mereka yang taat beragama karena hal ini sesuai pula dengan ajaran agama.

Asas kemanusiaan yang adil dan beradab pada prinsipnya ingin menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sebagai makhluk Tuhan dan sikap saling menghargai antara sesama manusia juga penghormatan bangsa Indonesia kepada bangsa lain.²⁷ Menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya dan sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk Tuhan berarti bahwa hak hak dasarnya harus memperoleh layanan dan perlindungan dengan semestinya. Hak untuk hidup, hak atas keselamatan badan, hak atas kebebasan diri, hak milik dan hak atas kehormatan adalah hak hak manusia yang asasi yang harus memperoleh perlindungan.

Bagi bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai nilai nilai dasar kehidupan, percaya bahwa moral kehidupan ekonominya mesti berlandaskan moral Pancasila. Ideologi Pancasila dimana pada gilirannya sangat kuat diilhami oleh nilai nilai agama, termasuk nilai nilai adat asli Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa. Dalam pada itu, karena agama Islam dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia maka ia paling besar peranannya dalam mempengaruhi aturan aturan nilainya.

²⁷ Presiden Soeharto, Op. Cit., hal. 140

99

Secara garis besar kita dapat melihat bahwa Islam memiliki pemikiran dasar tentang alam semesta, kehidupan dan manusia. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa konsep keadilan sosial berada dibawah pengaruh konsep dasar itu serta berada didalam tujuan universalnya. Bahwasannya watak pandangan Islam terhadap kehidupan manusia, telah menjadikan keadilan sosial ini sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi semata. Nilai nilai dalam kehidupan ini adalah nilai material dan sekaligus nilai immaterial, tidak mungkin dilakukan pemisahan antara keduanya. Perikemanusiaan itu merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, serasi dan bukan merupakan satu masyarakat yang penuh pertentangan.

Lompatan besar dalam masalah kemanusiaan seperti itu belum pernah disaksikan dalam sejarah umat manusia dan belum pernah dihasilkan oleh siapapun juga. Hal ini disebabkan karena apa yang ditetapkan oleh undang undang kemanusiaan dalam teori yang terdapat pada Revolusi Prancis dan gerakan gerakan yang sesudahnya dapat diwujudkan oleh Islam dalam kehidupan nyata.

Persamaan derajat manusia oleh Islam ditegakkan atas dasar teori kemanusiaan yang sempurna dan bersih dari fanatisme keagamaan sekalipun.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا الْآخِلًا وَعَنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ
خَطِيئَةٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا
إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَ قَوْمٌ عَدُوًّا لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

95

وَأَنْ كَانَ مِنْ عَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مَسْتَمَّةٌ إِلَى
 أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَجِيَامٌ شَهْرَيْنِ
 مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا النساء ٩٣

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh ... seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁸

Islam memberikan hak hak kepada kaum musyrikin dalam perlindungan jiwa mereka sama dengan yang diberikan kepada kaum mukmin, sepanjang ada perjanjian. Islam bersih dari fanatisme suku dan ras, dan persamaan derajat yang diciptakannya sudah sampai pada tingkatan yang selama ini belum pernah dicapai oleh peradaban Barat.²⁹

Akan halnya dalam masalah perbedaan kelamin, maka Islam telah memberikan jaminan yang sama dan sempurna. Kepada kaum wanita, ia diberikan kedudukan yang sejajar dengan kaum pria kecuali dalam beberapa segi yang berkaitan deng-

²⁸ Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 136

²⁹ Sayyid Quthb, Keadilan Sosial Dalam Islam, Pustaka Jakarta, 1984, hal. 68

an karakteristik biologis dan tabiat masing masing kelamin⁹⁶ yang tidak sampai berpengaruh pada kedudukan hakiki jenis kelamin manusia. Kalau seandainya mereka sama dalam struktur biologisnya, maka sama pulalah ketentuannya dan bila tidak sama, maka dari ketidaksamaan itulah lahirnya sedikit perbedaan itu. Islam memberikan jaminan yang penuh kepada kaum wanita dalam segala bidang baik, keagamaan, pemi-
likan dan pekerjaan.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.³⁰

Dasar dan semangat itulah yang melandasi asas kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia, semangat itulah yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Orde Baru. Dan menghindari paham sosialisme Barat maupun komunisme, karena bagi keduanya persamaan berarti sama rata sama rasa dalam pekerjaan dan upah. Bila persamaan dalam kerja dan upah ini sudah dapat diciptakan maka tercipta pula kebebasan bagi kaum wanita. Sebab persoalan yang paling pokok menurut pandangan keduanya tiada lain adalah materi. Semua dorongan yang ada dalam diri manusia dengan semua nilai nilai kemanusiaan terhimpun seluruhnya dalam unsur materi.³¹

³⁰ Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 417

³¹ Sayyid Quthb, Op. Cit., hal. 78

c. Asas Persatuan.

97

Indonesia bersatu pernah terancam karena salah menerapkan demokrasi atas pengaruh Soekarno, yang menjelma dari pembela demokrasi menjadi otokrat. Dengan runtuhnya rezim Soekarno persatuan Indonesia mulai hidup kembali. Perpecahan bangsa yang muncul karena rezim Orde Lama masih terasa, tetapi persatuan itu sudah mulai padu lagi dimasa Orde Baru. Dalam dada bangsa Indonesia mulai tertanam kuat rasa persatuan bangsa yang bersendikan "Bhinneka Tunggal Ika". Mereka lebih insyaf pula akan semboyan lama "bersatu kita teguh bercerai kita jatuh".

Asas persatuan Indonesia menjadi syarat hidup bagi bangsa Indonesia. Pada hakekatnya asas persatuan Indonesia mengandung prinsip nasionalisme, cinta bangsa dan tanah kelahiran serta menggalang rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya cita cita persahabatan dan persaudaraan segala bangsa.

Dilihat dari segi kehidupan bernegara maka kerukunan dan persatuan hanya akan tercapai apabila segenap warga patuh dan tunduk terhadap kaedah kaedah konstitusi. Konstitusi merupakan piagam perjanjian diantara warga sebagai satu bangsa. Dengan demikian segala perbedaan dapat terjembatani, segala pertentangan tidak diperuncing sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia telah memiliki landasan yang kuat dan adil untuk menampung segala kepentingan, aspirasi dan tata pergaulan hidup bangsa yaitu Pancasila.

Dalam masyarakat berdasarkan Pancasila itu, peranan⁹⁸ agama jelas sangat besar. Ajaran agama sangat perlu untuk memperkuat mental dan moral bangsa, baik dalam masa sulit maupun masa keemasan. Ajaran agama sungguh diperlukan, justru untuk memberi arah dan menjadi pegangan hidup bangsa dalam dunia modern dewasa ini. Umat beragama, dalam negara Indonesia mendapat jaminan dan diakui sepenuhnya, karena dengan dasar agama yang kuat akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila semakin kuat pula.³²

Sebagai bangsa yang sebagian besar terdiri dari umat Islam, yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan mendiami satu wilayah kepulauan nusantara, tidak mungkin mengesampingkan sumbangan agama Islam dalam membina kesatuan nasional bangsa. Islam jelas telah membawa perubahan-perubahan yang prinsipil dan sangat besar, bukan saja di tanah Arab melainkan berpengaruh juga pada peradaban umat manusia. Ajaran Islam yang bersumber pada ke-Esaan Allah, telah menyadarkan umat manusia bahwa mereka merupakan kesatuan umat.³³

Maka dengan mengangkat asas persatuan Indonesia sebagai salah satu asas dalam Pancasila, rasanya cukup dapat kita maklumi. Karena ide persatuan itu diberi nilai sangat tinggi oleh bangsa dan pendiri Republik kita. Ide persatuan ini bukan saja harus semakin tampak dalam kesatuan moral yang meliputi seluruh bangsa. Melainkan juga harus dima-

³²Presiden Soeharto, Op. Cit., hal. 185

³³Ibid., hal. 195

nifestasikan dalam bentuk bentuk yang bersifat lahiriah dari kesatuan kesatuan unsur yang ada. Tanpa persatuan dan kesatuan Indonesia hanya merupakan sekumpulan pulau kecil dan besar dan tebaran suku bangsa yang terpecah pecah dengan batasan laut maupun kultur setempat.

Sebagai umat terbesar tentu saja umat Islam punya tugas yang besar pula. Pertama tentu saja umat Islam harus membina persatuan dan kesatuan di antara sesama umat Islam sendiri. Adanya berbagai kelompok di kalangan umat Islam adalah suatu kenyataan, dengan kepentingan yang berbeda beda pula. Untuk memantapkan peranan umat Islam Indonesia tugas utama yang harus diselesaikan adalah bagaimana menumbuhkan dan memelihara solidaritas di antara umat Islam sendiri. Dengan demikian akan timbul dan terwujud kerukunan nasional yang menjadi prasyarat berhasilnya pembangunan.

Tugas membina dan mengembangkan persatuan dan kesatuan umat Islam terasa sangat penting, sebab disamping jumlahnya besar mereka juga tersebar di seluruh pelosok tanah air. Keadaan seperti itu merupakan suatu tantangan yang harus diatasi, tidak mungkin dibiarkan. Pembangunan umat adalah pekerjaan besar dan setiap pekerjaan besar baru dapat berhasil apabila ada persatuan antara seluruh umat. Maka umat beragama harus bersatu, umat Islam harus bersatu, umat Kristen harus bersatu, umat Budha harus bersatu, semua umat beragama harus bersatu menuju persatuan yang lebih besar dan lebih kokoh ialah persatuan seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian diharapkan akan terjelma kekompakan

nasional. Hanya dengan kekompakan kita bisa membangun bangsa dan negara. ¹⁰⁰

Agama Islam telah menghilangkan prasangka kesukuan serta mengajarkan prinsip persatuan bangsa dan persamaan umat manusia. Oleh karena itu kita merasa prihatin jika melihat adanya gejala yang menunjukkan fanatisme golongan dengan tidak melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu kesatuan dan keutuhan bangsa. Gejala seperti yang oleh agama Islam disebut ashabiyah adalah sebagai salah satu ciri kejahiliyahan. Dengan ajaran tentang persatuan dan persamaan manusia maka Islam juga amat mementingkan soal kerukunan dalam pergaulan hidup yang amat majemuk. Sebagai bukti, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, langkah awal yang ditempuh adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Ajaran Islam dan contoh dari Nabi Muhammad itulah yang harus dapat kita lakukan dan laksanakan dalam pembangunan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila.³⁴

Kombinasi Islam Nasionalisme secara historis telah lama terjalin dan mencapai puncaknya pada Dasar Negara Indonesia, Pancasila. Perumusan Pancasila yang pertamakali dilakukan oleh golongan agama dan golongan nasionalis, yaitu, nasionalisme yang berprrikemanusiaan, yang berdemokrasi dan berkesejahteraan sosial dipadukan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵

³⁴ Ibid., hal. 1

³⁵ A. Dahlan Ranuwiharjo, Mengapa Soekarno Cooperation Dengan Jepang ? Pelita, Sabtu 18 Juli 1987.

d. Kerakyatan dalam Permusyawaratan. 107

Bagi kita perkataan kerakyatan adalah sebagai pelengkap pengertian sosialisme kita. Tidak lain merupakan suatu penghayatan dan penegasan bahwa sosialisme yang kita pahami itu selamanya berpegang pada dan menjunjung tinggi dasar dan persamaan derajat manusia. Sehingga kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa segolongan kecil yang menganggap dan merasa serta berlaku sebagai golongan yang istimewa, sebagaimana mereka yang menamakan dirinya komunis stalinis. Kita menolak pada ajaran yang membenarkan adanya golongan yang paling pandai dan ahli dalam melaksanakan revolusi sosialis.

Arti sosialisme kerakyatan sebagaimana yang kita anut itu lebih jelas dan tegas, apabila kita bandingkan dengan kenyataan serta praktek kaum stalinis Rusia. Karena itu dalam usaha hendak menggabungkan dan mempersatukan semua keinginan, gerakan dan tenaga sosialis itu haruslah mengemukakan jiwa kerakyatan dan kemanusiaan sosialisme yang kita perjuangkan.³⁶

Sebagaimana dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945, pasal 33 :

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi..... Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu ha-

³⁶ Sutan Sjahrir, Sosialisme Indonesia Pembangunan, -LEPPENAS, Jakarta, 1982, hal. 91

rus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁷

102

Orientasi kerakyatan yang kuat jelas ditekankan dalam dasar perekonomian Indonesia.

Menurut Hatta ada lima anasir demokrasi asli yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu, rapat, mufakat, tolong menolong atau gotong royong, protes bersama dan kebebasan menyingkir dari kekuasaan. Kelima anasir itu begitu digandrungi oleh pendiri nasional dan akan menjadikan kelima anasir itu sebagai dasar pemerintahan Indonesia.³⁸

Analisis sosial menunjukkan bahwa tidak semua yang tampak bagus pada demokrasi desa dapat dipakai begitu saja pada tingkat negara. Mufakat yang dipraktekan di desa desa ialah mengambil keputusan dengan kata sepakat dengan persetujuan semuanya setelah masalah diperbincangkan panjang lebar. Sebelum terdapat kata sepakat belum dapat diambil keputusan. Sedang keputusan dengan mufakat tidak mungkin tercapai di dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang di dalamnya banyak partai dan pertentangan politik. Betapapun juga orang tidak mau melepaskan cita cita demokrasi sosial yang bersemdikan kepada organisasi sosial di dalam masyarakat asli sendiri.

Musyawarah merupakan prinsip yang menentang elitisme yang mengajarkan bahwa hanya orang orang yang menjadi pemimpin saja yang tahu cara mengurus dan mengelola negara.

³⁷ Sekretariat Negara RI, UUD 1945, P4 Dan GBHN, Mutiara Sakti Utama, Jakarta. 1985, hal. 20

³⁸ Mohammad Hatta, Membangun Ekonomi Indonesia, Idayu press, Jakarta, 1985, hal. 8

Sedangkan rakyat harus mengikuti kemauan pemimpin (elite),¹⁰³ apakah itu elite ekonomi, elite politik maupun militer.

Asas kerakyatan dalam permusyawaratan merupakan manifestasi demokrasi sosial Indonesia. Demokrasi di sini bukanlah demokrasi liberal, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam hubungannya dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, kerakyatan berarti demokrasi yang memperhatikan dan menghormati nilai ketuhanan dan nilai keagamaan. Kerakyatan berarti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus dilakukan dengan cara musyawarah yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Musyawarah yang dijalankan sebagaimana diajarkan agama akan menjadi pagar pencegah bagi penyelewengan negara ke arah otoriterisme, despotisme, diktatorisme dan berbagai sistem lain yang membunuh hak hak politik rakyat. Partisipasi rakyat harus dihargai sepenuhnya dalam pengelolaan negara, sebab rakyat adalah pemilik negara yang sesungguhnya. Sedangkan pemimpin adalah merupakan pelayan rakyat begitulah ajaran agama.

Prinsip itu (musyawarah) juga mengajarkan bahwa kekuasaan negara harus dipilih oleh rakyat secara bebas, berdasarkan pengertian bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan negara. Dengan kata lain, musyawarah merupakan fundamental yang sangat penting dalam menjamin negara dan masyarakat agar tidak hanyut dalam kultus individu dan fir'aunisme.³⁹

³⁹M. Amien Rais, Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta, Mizan, Bandung, cet. III, 1991, hal. 48

104

Demokrasi yang berlandaskan musyawarah ini sangat sejalan dengan ajaran Islam. Di mana banyak sekali ayat ayat Alquran yang memerintahkan agar manusia dalam menjalani kehidupannya harus berlandaskan musyawarah. Salah satunya:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى: ٣٨)

Dan (bagi) orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka men-
40
arkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka.

Dan perlu ditambahkan di sini bahwa musyawarah yang melahirkan kemufakatan di dalam Islam disebut Ijma', dalam hal ini tidak dalam pengertian lughawi (bahasa). Namun essensi nya tidak jauh berbeda yakni untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sekalian nilai nilai agama.

e. Asas Keadilan Sosial.

Keadilan sosial bukan saja dasar negara, tetapi juga menjadi tujuan yang harus dilaksanakan. Pada prinsipnya, asas keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, bukan merata yang statis melainkan dinamis dan selalu meningkat. Keadilan sosial mempunyai pengertian yang amat luas, yang bertumpu pada pokok pikiran-
setiap warga negara dalam menikmati hidup secara terhormat tercukupi kebutuhan hidupnya dan memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan bakatnya bagi kepentingan pribadi dan masyarakat. Jika keadilan sosial berarti memberikan kepada

⁴⁰ Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 789

105
anggota masyarakat apa yang menjadi haknya, maka semua itu
atas dasar kelayakan dan keseimbangan.

Keadilan sosial oleh Mubyarto didefinisikan sebagai
suatu kondisi di mana masyarakat dan semua warga dapat me-
rasakan ketentraman lahir bathin dengan dapat dilaksanakan
semua prinsip prinsip oleh seluruh anggota masyarakat. Ke-
adilan sosial bagi seluruh rakyat berarti seluruh rakyat
semua kelompok sosial mampu menikmati rasa aman dan damai.
Dan keadilan sosial tidak berdiri sendiri, ia mempunyai ka-
itan dengan semua aspek kehidupan baik hukum, politik, so-
sial maupun ekonomi.³¹

Mungkin satu satunya faktor yang kuat mengenai dian-
utnya sistem sosialisme terletak pada pencantuman asas ke-
adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama sama
dengan penegasan tujuan pembangunan nasional yaitu masyara-
kat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Penyebutan adil terlebih dulu secara im-
plisit terkandung adanya semangat sosialisme yang menekan-
kan pada aspek keadilan sosial.

Asas pemerataan dan keadilan sosial dalam sistem eko-
nomi Pancasila memang dapat kita temukan dalam jiwa dan se-
mangat UUD 1945 dan falsafah hidup bangsa kita. Tanpa pene-
gasan dan program yang nyata dalam delapan jalur pemerata-
an, pada dasarnya bangsa Indonesia sudah harus mampu merea-
lisasikan keadilan sosial.

³¹Mubyarto, Beberapa Ciri dan Landasan Pikiran Sistem
Ekonomi Pancasila, dalam, Sri Edi Swasono, (ed.), Sistem
Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, UI Press, Jakarta, cet. II -
1987, hal. 151

106

Keadilan sosial dalam falsafah hidup bangsa Indonesia tidak hanya diartikan keadilan legalitas di mata hukum melainkan suatu keadilan yang dinamis, yaitu yang diukur dan dipandang dalam prespektif peranan seseorang dalam masyarakat. Dengan demikian keadilan ini tidak memecah belah satu manusia dengan yang lain, tidak memecah satu situasi-dengan situasi yang akan datang, melainkan melihat peranan setiap orang di dalam kesatuan masyarakatnya dan di dalam kesatuan kurun waktu sekarang dan esok. Keadilan legalitas akan menentukan balas jasa yang sama untuk peranan usaha yang sama pula. Tetapi keadilan sosial akan memberi balas jasa yang berbeda karena peranan sosial masing masing-tidak sama, baik masa sekarang atau masa datang.

Pendekatan pemerataan biasanya dianggap merupakan interpretasi dari equality, karena dari pengamatan adanya ketimpangan ketimpangan di antara anggota masyarakat. Memang pemerataan secara penuh tidak mungkin dapat dicapai, yang bisa dicapai adalah sekedar mengurangi ketimpangan ketimpangan yang ada. Adapun dicanangkannya program pemerataan oleh pemerintah Orde baru sejak 1979, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang melaju sejak 1969 masih ada sekelompok masyarakat yang tertinggal di belakang. Kelompok masyarakat yang tertinggal ini ada yang pendapatan riilnya naik sangat sedikit dan bahkan tidak mengalami kenaikan sama sekali.

Asas keadilan sosial secara tekstual kita melihat penambahan kata sosial, yang berarti bahwa ukuran keadilan di sini didasarkan atas norma sosial atau ukuran masyarakat-

107

kat sebagai keseluruhan. Kalau memang demikian maka jelas-
bahwa semangat sosialisme erat hubungannya dengan pengerti-
an keadilan sosial, dimana bukan ukuran penguasa yang ter-
utama tetapi norma norma masyarakat.

Setelah kita tahu dan meyakini bahwa keadilan sosial
sebagai nilai dan cita, maka tinggal memikirkan bagaimana-
melaksanakannya. Dan karena cita cita keadilan sosial itu
tidak menjadi monopoli bangsa Indonesia, melainkan juga me-
rupakan bahan pembahasan bangsa bangsa di dunia. Para pe-
mimpin dan pendiri nasional telah menyadari hal itu sepen-
uhnya, sehingga dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa-
bangsa Indonesia harus mempunyai peran dalam perdamaian du-
nia.

Asas keadilan sosial dalam penyelenggaraan dan pene-
rapannya tetap berada dalam bimbingan asas Ketuhanan Yang
Maha Esa. Untuk bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan
sosial senantiasa berpijak pada dasar ketuhanan dan ajaran
agama. Paling tidak agama atau nilai ketuhanan akan menam-
bah nilai yang lebih mendalam atas cita cita keadilan sosi-
al yaitu, sejahtera di dunia dan di akhirat kelak. Selain
itu sosialisme yang hendak diwujudkan di bumi Indonesia bu-
kanlah yang berakar dari pandangan materialisme komunisme.

Satu hal yang tidak boleh kita lupakan ialah komit-
men manusia tauhid atau yang Berketuhanan Yang Maha Esa da-
lam segala aktifitasnya selalu mengikuti kehendak Tuhan. Ke-
hendak Tuhan ini memberikan visi kepada manusia tauhid un-
tuk membentuk suatu masyarakat yang mengejar nilai nilai
utama dan mengusahakan tegaknya keadilan sosial. Manusia

yang Berketuhanan mempunyai kewajiban untuk menegakkan suatu orde sosial yang adil dan etis. Dengan menghindari ketidakadilan sosial ketimpangan ekonomi untuk menegakkan suatu tatanan sosial yang etis dan egalitarian. Dengan visinya manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa harus melihat konsekwensi konsekwensi tindakannya, dalam bidang ekonomi, politik, budaya maupun bidang kehidupan lainnya. Dengan mengarahkan kepada suatu tujuan yang menjadi dasar komitmennya yaitu kepada Tuhan.

oooooo A B F ooooo